

PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA

*Ayu Marchsela Hanibe¹
Sarah Sambiran²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Profesionalisme aparatur sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparatur yang yang tercemin dalam prilakunya. Hal tersebut dapat mengacu pada potensi aparatur dalam mengerjakan tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam bekerja maka setiap tugas akan di lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mengingat aparatur adalah tumpuan dan harapan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan maka dari itu aparatur dituntut professional dalam menjalankan pemerintahan karena hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas kerja yang akan diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme aparatur sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan kualitas kerja, dimana aparatur memiliki tuntutan untuk professional karena memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang di emban. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi atau kemampuan dan keahlian wajib dimiliki oleh aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah, dimana profesionalismenya aparatur sipil Negara tergantung dari kompetensinya. Maka dari itu aparatur sipil Negara dituntut untuk memiliki kompetensi agar supaya setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal memberikan pelayanan. Dengan begitu maka kualitas kerja pun akan meningkat.

Kata Kunci : Profesionalisme, Kompetensi dan Efektifitas, ASN.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Manajemen Sumber Daya aparatur sipil Negara menjadi salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil Negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga Negara. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada aparatur sipil Negara dimana aparatur sipil Negara memegang peranan penting dan sangat menentukan pelaksanaan pemerintah yang merumuskan kebijaksanaan Negara dalam rangka melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dimana dalam setiap tugas dan fungsinya meski berbeda – beda namun tetap bertujuan mensukseskan pembangunan nasional. Maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan diperlukan aparatur yang professional untuk dapat meningkatkan suatu kualitas kerja. Peningkatan profesionalisme kerja aparatur harus dapat dilaksanakan dan diwujudkan secara maksimal dan optimal , agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil Negara menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya aparatur adalah untuk meningkatkan kualitas kerja didalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Profesionalisme aparatur sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparatur yang yang tercemin dalam prilaku sehari-hari. Hal tersebut dapat mengacu pada potensi aparatur dalam mengerjakan tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme dari

aparatur pemerintah dalam bekerja mengingat aparatur adalah tumpuan dan harapan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan maka dari itu aparatur dituntut professional dalam menjalankan pemerintahan karena hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan.

Seorang aparatur harus memiliki profesionalisme dikarenakan beberapa tuntutan diantaranya adalah :

1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu, memberikan pelayanan public.
2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance)
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa dicegah dan ditolak lagi

Mengingat Badan kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen di bidang kepegawaian dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dimana dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban. Maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pelaksanaan, pendidikan, dan pelatihan kepemimpinan serta diklat teknis dan fungsional, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang secara administrasi dan operasionalnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Aparatur yang professional dalam

melakukan tugas dan fungsinya dapat mendukung pelaksanaan administrasi pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Mengingat kedudukan dan fungsinya yang sedemikian penting, strategis dan luas maka sangat diperlukan aparatur yang professional dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidang kepegawaian, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga diharapkan tugas dan fungsi yang diembannya dapat dilaksanakan secara optimal. Dimana aparatur yang berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam melakukan setiap tugas dan fungsinya maka diperlukan aparatur yang professional agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan.

Karena seseorang aparatur dapat dikatakan memiliki profesionalisme kerja jika aparatur memiliki kemampuan kerja, kompetensi dan skill dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan tugas pokok masing – masing aparatur. Pada prinsipnya profesionalisme adalah komitmen pribadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan terefisien bagi orang – orang yang membutuhkan hasil kerja yang dilakukan oleh aparatur.

Dengan mengkaji aspek profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya, didapati berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat kurang profesionalnya aparatur Sipil Negara dalam bekerja adalah pada SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang dipakai menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang berhubungan dengan kepegawaian, dimana data dalam aplikasi SIMPEG tersebut belum sepenuhnya memadai

sehingga aparatur yang berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pegawai. Padahal dengan adanya SIMPEG dapat memudahkan serta meningkatkan kebutuhan administrasi kepegawaian. Namun karena belum tersedianya sarana dan prasana SIMPEG yang memadai sehingga dalam memberikan pelayanan aparatur yang berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang efisien.

Permasalahan yang juga dihadapi adalah dalam memberikan pelayanan, aparatur yang berada di Badan Kepegawaian Daerah belum optimal dalam pengurusan karena kurangnya sumber daya aparatur, padahal kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu instansi. Dimana sumber daya manusia saat ini bukan lagi sekedar alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi, tapi merupakan aset yang penting dan dapat dikembangkan. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sumber daya manusia bergerak secara aktif, kreatif dan inovatif agar terciptanya aparatur yang profesionalisme dalam bekerja. Seperti halnya instansi pemerintahan yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai sesuai dengan fungsinya.

Tinjauan Pustaka

Profesionalisme berasal dari akar kata “Profesi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), profesionalisme adalah “tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi” sedangkan profesi merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuasaan

tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreatifitas, (Widodo 2005:315)

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010:96) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta tanggung jawab. Dimana perlu memiliki kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang muncul tidak tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas terpenuhnya kecocokan antara kemampuan dan kebutuhan tugas merupakan salah satu syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Dan apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan public secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kurniawan (2005:79).

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam bekerja setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena didalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, dan tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian atau elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Professional adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya yaitu : (Maruf 2013:7)

1. Skill artinya seseorang itu benar-benar ahli dibidangnya
2. Knowledge tidak hanya ahli dibidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya.
3. Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Menurut Mertin Jr (dalam Kurniawan 2005:75) karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Equality

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya.

2. Equity

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistic kadang-kadang

diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

3. Loyalty

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan lainnya.

4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang dikerjakannya.

Faktor-faktor yang mendukung profesionalisme kerja pegawai menurut Kurniawan (2005:78) yaitu sebagai berikut :

1. Keterampilan

Keterampilan cenderung menggunakan istilah kemampuan untuk keterampilan dalam diri pegawai, yaitu tersedianya modal kecakapan, ketangkasan atau modal lainnya yang memungkinkan anggota itu dapat berbuat banyak bagi organisasinya.

2. Kompetensi

Menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan cermin kemampuan (competency) yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan bisa melakukan, ditunjang dengan pengalaman yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa perjalanan waktu. Oleh karena itu berkaitan dengan pelayanan public maka kemampuan pegawai sangat diperlukan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi profesionalisme kerja. Meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya factor yang berpengaruh terhadap profesionalisme kerja, akan tetapi diyakini bahwa kompensasi merupakan salah satu factor penentu dalam membangkitkan profesionalisme kerja.

4. Loyalitas

Secara teoritik loyalitas berhubungan dengan tingkat kedisiplinan, terutama dalam hal ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Kedisiplinan akan terwujud dengan baik jika aparatur mampu menaati peraturan – peraturan yang ada. loyalitas juga berkaitan erat dengan kemampuan pertanggung jawaban tugas pekerjaan dan daya tanggap. Selain itu loyalitas tidak membedakan pemberian pelayanan atas dasar golongan tertentu.

5. Performansi

Performansi merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses yang lebih menekankan individu menurut Smith (dalam Kurniawan 2005:110) sedangkan menurut Gibson (dalam Kurniawan 2005:112) bahwa performance adalah prestasi (kehandalan dan kecakapan) adalah hasil yang diinginkan dari perilaku.

6. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang pada umumnya merupakan pernyataan filosofis, dapat difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat para aparatur karena dapat diformulasikan secara formal kedalam berbagai peraturan dan ketentuan organisasi.

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat para ahli :

Menurut Sedarmayanti (2009:319) Aparatur Negara merupakan pelaksana roda birokrasi, dimana birokrat adalah :

1. Birokrat adalah pegawai yang bertindak secara birokratis
2. Birokrat adalah:
 - a. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

b. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya)

c. Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintahan yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk, Ia menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang rumit dan bergantung kepada perintah atasan, berjiwa satis dank arena itu menghambat kemajuan.

Unsur daripada aparatur adalah pegawai negeri yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil pusat dan Daerah, Anggota Tentara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Aparatur bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bertindak secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil. Menurut Sedarmayanti (2009:371) hak – hak yang diterima oleh PNS, antara lain adalah:

- a. Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab
- b. Memperoleh cuti
- c. Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dank arena menjalankan tugas dan kewajibannya.
- d. Memperoleh tunjangan bagi bagi yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dank arena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan paapun juga.
- e. Memperoleh uang duka dari kerabat Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

f. Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

g. Memperoleh kenaikan pangkat

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil menurut Sedarmayanti merupakan hak dasar berprestasi yang layak, mendapatkan waktu istirahat yang sesuai, serta tunjangan-tunjangan yang sewajarnya. Aparatur akan memenuhi kewajibannya jika hak-hak tersebut terpenuhi. Jika kesejahteraan aparatur tercapai, maka aparatur akan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kewajiban.

Aparatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) aparatur adalah perangkat, alat (Negara, pemerintah): para pegawai (negeri): Negara alat kelengkapan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari : pemerintah pegawai negeri : alat Negara : aparatur nrgara.

Aparatur adalah orang – orang yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan. Mangkunegara (2006 : 6 7)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007;4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong

(2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata – kata, gambar dan bukan angka – angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif

Penelitian ini difokuskan pada profesionalisme Aparatur sipil Negara dalam meningkatkan kualitas kerja. Yang dikaji berdasarkan teori profesionalisme kerja Sedarmayanti (2010: 98) yaitu :

1. Kompetensi yang terdiri dari :
 - a. Keterampilan
 - b. Pengetahuan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara.
2. Efektivitas kerja yang terdiri dari :
 - a. Kuantitas kerja
 - b. Kualitas kerja
 - c. Waktu pekerjaan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara

Dalam penelitian kualitatif informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk itu perlu ditentukan informan penelitian dimana yang dapat memberikan sumber informasi.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
3. Aparatur Yang berada di BKD 3 Orang
4. Aparatur Sipil Negara 5 Orang

Hasil Penelitian

Profesionalisme aparatur sipil Negara sangat ditentukan oleh setiap kemampuan para aparatur dalam bekerja, dimana dengan tingkat kemampuan aparatur yang tinggi dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur sipil Negara akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan dapat meningkatkan kualitas kerja.

Kata kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan

kemampuan, seseorang yang kompeten adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Keberadaan aparatur sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis, karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai setiap aparatur sipil Negara. Maka dari itu aparatur sipil Negara dituntut untuk memiliki kompetensi agar supaya setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal memberikan pelayanan.

Dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil Negara yang berada di Badan kepegawaian Daerah (BKD) jika aparatur mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan tepat waktu. tepat guna, tepat sasaran dengan menggunakan keahlian dan keterampilannya. Dengan begitu maka kualitas kerja pun akan meningkat, kualitas kerja aparatur sipil Negara dapat dilihat ketika aparatur dapat mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dan untuk menciptakan kualitas yang baik maka diperlukan disiplin kerja yang baik pula.

Dengan adanya disiplin kerja yang baik maka setiap aparatur akan mematuhi setiap peraturan yang ada mulai dari jam masuk kerja, melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat lain bukan karena dinas. dan apabila terlaksana dengan baik akan menjadikan perilaku yang disiplin, dan membuat setiap pekerjaan daripada aparatur menjadi lebih terarah dalam meningkatkan kualitas kerja.

Efektivitas kerja yang dalam hal ini terdiri dari : kuantitas kerja, kualitas kerja, dan waktu pekerjaan yang dimiliki Aparatur Sipil Negara di Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) dimana efektifitas juga digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi. Untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan, keahlian dan keterampilan. Efektif tidaknya suatu program dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya, jika aparatur yang menjalankannya memiliki kemampuan yang baik maka setiap pekerjaan dan program yang ada akan mudah mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Maka dari itu aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah harus memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja, efektivitas kerja diukur berdasarkan keterampilan kerja, disiplin kerja dan kemampuan aparatur dalam melakukan setiap pekerjaannya. Karena dengan keterampilan kerja akan menunjukkan kemampuan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas. Efektifnya setiap tugas yang diberikan menghasilkan kualitas kerja maka dengan kualitas kerja mampu mencapai setiap tujuan organisasi.

Tanggung jawab merupakan kesanggupan seseorang aparatur sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik – baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Setiap aparatur wajib memiliki sikap tanggung jawab karena dengan tanggung jawab maka aparatur akan selalu melakukan tugas dengan sebaik – baiknya dan tepat pada waktunya dan dengan tanggung jawab maka setiap aparatur tidak akan mengutamakan kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan. Maka dari itu pentingnya

sikap tanggung jawab dimiliki oleh setiap aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar setiap pekerjaan yang dilakukan terlaksana dengan baik serta tidak akan melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain, namun berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.

Maka setiap aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah harus mempunyai sikap tanggung jawab dimana dengan tanggung jawab aparatur akan merasa setiap pekerjaan yang diberikan atau diembankan adalah penting dan harus diselesaikan dengan baik, dengan adanya sikap tanggung jawab membuat aparatur sipil Negara mempunyai kesadaran akan setiap tugas dan fungsinya

Kesimpulan

1. Kompetensi atau kemampuan dan keahlian wajib dimiliki oleh aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah, dimana profesionalismenya aparatur sipil Negara tergantung dari kompetensinya. Maka dari itu aparatur sipil Negara dituntut untuk memiliki kompetensi agar supaya setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal memberikan pelayanan. Dengan begitu maka kualitas kerja pun akan meningkat,
2. Sebagai badan yang memajemen bidang kepegawaian maka para aparatur yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah juga harus memiliki disiplin kerja yang tinggi, karna dengan disiplin kerja yang tinggi maka setiap peraturan dan ketentuan yang ada pasti akan selalu dipatuhi, dengan adanya disiplin kerja membuat setiap pekerjaan yang ada menjadi terarah dan lebih efektif,

3. Profesionalisme aparatur dalam bekerja dapat dilihat juga dari tanggung jawab yang diembankan kepadanya, aparatur yang mampu melaksanakan setiap tugas yang diembankan kepadanya dengan baik merupakan aparatur yang memiliki tanggung jawab. Maka dari itu sangat diharapkan untuk setiap aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian untuk memiliki sikap tanggung jawab, karena dengan adanya sikap tanggung jawab menjadikan aparatur sipil Negara memiliki kesadaran diri, dengan kesadaran diri membuat aparatur bersikap lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan setiap pekerjaannya.

Saran

1. Setiap aparatur yang berada di Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dalam melakukan pekerjaan perlu ditingkatkan, dan tidak hanya berharap pada 1 (satu) orang
2. Dalam kaitannya dengan disiplin kerja aparatur yang berada di badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu menerapkan disiplin dalam bekerja terhadap seluruh aparatur yang dengan ketat serta diberikan sanksi yang jelas terhadap seluruh aparatur yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, M. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Makro dan Mikro. Bandung : PT. LKis Pelangi Aksara.

Hasibuan, M. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan".

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan".

Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta; Pembaharuan.

Matutina. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya.

Moehariono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya: Ghalia.

Manoppo, W. 2012. Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Skripsi

Mangkunegara, P. 2006. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama.

Oroh, A. 2017. Profesionalisme Perangkat Kelurahan Dalam Pelayanan Publik. Skripsi.

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja .Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2010. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua; Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung; Mandar Maju.

Salam, S. 2005. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta; Djambatan.

Sinambela, P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, dkk. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: APMD Press

Widjaya, A. 2006. Administrasi Kepegawaian. Bandung: Rajawali.